

**PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA
BANDAR LAMPUNG**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
30 Juni 2021

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor :222/PMK.05/2016. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas /pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandar Lampung, 19 Juli 2021
Sekretaris,



MUHAMMAD TAYIB, SE, SH.
NIP. 197802212005021002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi	2
PernyataanTanggung Jawab	3
Ringkasan	4
Laporan Realisasi Anggaran	6
Neraca	7
Laporan Operasional	8
Laporan Perubahan Ekuitas	9
Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos LaporanRealisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	42
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	48
F. Pengungkapan Penting Lainnya	52
II. Lampiran dan Daftar	

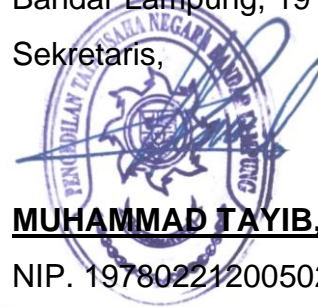
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG
JALAN PANGERAN EMIR M. NOER NO. 27 BANDAR LAMPUNG
TELEPON 0721 258320, FAXIMILE 0721 258320

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandar Lampung, 19 Juli 2020
Sekretaris,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. The stamp contains the text 'PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG' around the perimeter. In the center, there is a signature in blue ink over a blue circular stamp. Below the signature, the name 'MUHAMMAD TAYIB, SE, SH.' is printed in bold, underlined black text. Below the name, the NIP number '197802212005021002' is printed.

MUHAMMAD TAYIB, SE, SH.

NIP. 197802212005021002

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Semester I Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021. Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 5.827.355 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 0. Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp. 3.718.008.622 atau mencapai 51 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.366.315.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2021. Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 16.127.422.467 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 63.202.746; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 16.064.219.721; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 60.000.000 dan Rp. 16.067.422.467.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 6.375.606, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 3.755.578.607 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 3.749.203.001). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 491.249 dan sebesar Rp. 0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 3.748.711.752.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 15.513.419.952 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp. 3.748.711.752) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 4.302.714.267 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp. 16.067.422.467.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 30 JUNI 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-21		% thd Angg	30-Jun-20
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	5.827.355	#DIV/0!	10.269.312
JUMLAH PENDAPATAN		-	5.827.355	#DIV/0!	4.822.299
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	5.568.117.000	2.957.799.997	53,12	2.690.373.083
Belanja Barang	B.4	1.503.198.000	522.958.625	34,79	396.753.849
Belanja Modal	B.5	265.000.000	237.250.000	89,53	24.600.960
JUMLAH BELANJA		7.336.315.000	3.718.008.622	50,68	3.111.727.892

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG NERACA PER 30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-21	31-Des-20
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	60.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	3.202.746	8.583.592
Jumlah Aset Lancar		63.202.746	8.583.592
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	8.525.936.000	8.525.936.000
Peralatan dan Mesin	C.15	3.162.702.231	2.925.452.231
Gedung dan Bangunan	C.16	7.843.212.000	7.252.679.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	15.221.000	15.221.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	5.628.678	5.628.678
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(3.488.480.188)	(3.204.228.657)
Jumlah Aset Tetap		16.064.219.721	15.520.688.252
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	68.090.000	68.090.000
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(68.090.000)	(68.090.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		16.127.422.467	15.529.271.844
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	60.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	14.812.392
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	1.039.500
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		60.000.000	15.851.892
JUMLAH KEWAJIBAN		60.000.000	15.851.892
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	16.067.422.467	15.513.419.952
JUMLAH EKUITAS		16.067.422.467	15.513.419.952
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		16.127.422.467	15.529.271.844

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 30 JUNI 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-21	30-Jun-20
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	6.375.606	6.702.813
JUMLAH PENDAPATAN		6.375.606	6.702.813
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.952.863.789	2.690.373.083
Beban Persediaan	D.3	30.435.132	20.758.130
Beban Barang dan Jasa	D.4	325.216.908	264.923.565
Beban Pemeliharaan	D.5	162.661.247	89.986.100
Beban Perjalanan Dinas	D.6	150.000	8.569.400
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	284.251.531	234.419.039
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		3.755.578.607	3.309.029.317
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.749.203.001)	(3.302.326.504)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	-	5.199.999
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus/Defisit Aset Non Lancar		-	5.199.999
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		491.249	1.564.129
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	1.185.850
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		491.249	378.279
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		491.249	5.578.278
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(3.748.711.752)	(3.296.748.226)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 30 Juni 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-21	30-Jun-20
EKUITAS AWAL	E.1	15.513.419.952	15.788.285.258
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.748.711.752)	(3.296.748.226)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPA KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	4.302.714.267	3.101.458.580
EKUITAS AKHIR	E.5	16.067.422.467	15.592.995.612

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung mengusung cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Mahkamah Agung yakni TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG dengan menuangkan dalam visi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagai berikut:

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan juga mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain
3. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
6. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
7. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. VISI Menciptakan Aparatur Negara yang tertib Administrasi dan bertanggung jawab.
2. MISI Melakukan Penegakan Hukum Administrasi.
3. TUJUAN Terwujudnya Pemerintahan yang kuat bersih dan berwibawa dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.
4. SASARAN Terwujudnya lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel, mandiri dan bersih dalam fungsinya sebagai penegak kebenaran dan keadilan bagi masyarakat, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya penegak hukum.
5. STRATEGI Mendorong percepatan persidangan agar tercipta peradilan yang cepat, sederhana dan murah.
6. KEBIJAKAN Memberikan Perlindungan Hukum untuk Para Pencari Keadilan
7. PROGRAM Peningkatan Kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya.
8. KEGIATAN Penyelenggaraan Peradilan tingkat pertama
9. TUGAS Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.5/1986)

FUNGSI Ketertiban dan keamanan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I TA 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Disamping itu, dalam

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara

proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan

jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (Satu Juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap Aset Tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan dan jembatan dan Bangunan air pada Kementerian/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2018. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatannya. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data Pasar, Pendekatan Biaya, dan/atau Pendekatan Pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain tanah.
- Nilai Aset Tetap hasil Penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutan adalah nol. Dalam hal ini nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku

sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan

disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
 - Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
 - Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- ✓ Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung* belum mengadakan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Realisasi

Pendapatan Rp.

5.827.355,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 5.827.355 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Hal ini disebabkan karena bagian Perencanaan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung lupa untuk menginput Estimasi pada saat penyusunan anggaran tahun 2021, dan akan segera melakukan revisi Dipa pada bulan Agustus 2021 untuk menginput Estimasi Pendapatan pada Dipa 01. Pendapatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terdiri dari, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	30-Jun-21		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pend. Sewa Tanah, Gedung, Bangunan	-	5.336.106	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	491.249	#DIV/0!
Jumlah	-	5.827.355	#DIV/0!

Realisasi Pendapatan Semester I TA 2021 mengalami Penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar (43,25) persen dibandingkan Semester I TA 2020. Hal ini disebabkan karena tidak adanya Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN pada Semester I TA 2021.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2020	REALISASI 30 JUNI 2019	NAIK (TURUN) %
Pend. dari Pemindahtanganan BMN	-	5.199.999	-100,00
Pend. Sewa Tanah, Gedung, Bangunan	5.336.106	5.069.313	5,26
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	491.249	-	#DIV/0!
Jumlah	5.827.355	10.269.312	-43,25

*Realisasi
Belanja Negara
Rp.
3.718.008.622,-*

B. 2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 3.718.008.622 atau 51% dari anggaran belanja sebesar Rp. 7.336.315.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2021

Uraian	per 30 Juni 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	5.568.117.000	2.957.799.997	53,12
Belanja Barang	1.503.198.000	522.958.625	34,79
Belanja Modal	265.000.000	237.250.000	89,53
Total Belanja Kotor	7.336.315.000	3.718.008.622	50,68
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	7.336.315.000	3.718.008.622	50,68

Dibandingkan dengan belanja per 30 Juni 2020, Realisasi Belanja per 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar 19,48%. Hal ini disebabkan karena naiknya pagu belanja barang dan belanja modal pada tahun ini. Dan untuk belanja modal sendiri sudah direalisasikan semua pada Semester I Tahun 2021 ini.

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020

URAIAN	Realisasi 30 Juni 2021	Realisasi 30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.957.799.997	2.690.373.083	9,94
Belanja Barang	522.958.625	396.753.849	31,81
Belanja Modal	237.250.000	24.600.960	864,39
Jumlah	3.718.008.622	3.111.727.892	19,48

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp.

2.957.799.997,-

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.957.799.997 dan Rp. 2.690.373.083. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar 9,94 persen dibandingkan per 30 Juni 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- ✓ Adanya Penambahan Pegawai Calon pegawai Negeri Sipil sebanyak 2 orang.

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020

URAIAN	REALISASI PER 30 JUNI 2021	REALISASI PER 30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.957.799.997	2.690.373.083	9,94
Jumlah Belanja Kotor	2.957.799.997	2.690.373.083	9,94
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	2.957.799.997	2.690.373.083	9,94

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp.

522.958.625,-

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 522.958.625 dan Rp. 396.753.849. Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar 31,81% dari Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2020. Hal ini antara lain disebabkan karena meningkatnya jumlah pagu anggaran dan realisasi Belanja Barang pada tahun 2021 ini.

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 20

URAIAN	REALISASI PER 30 JUNI 2021	REALISASI PER 30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	269.956.020	217.438.485	24,15
Belanja Barang Non Operasional	7.048.800	3.355.000	110,10
Belanja Jasa	86.955.408	77.294.564	12,50
Belanja Pemeliharaan	158.848.397	90.096.400	76,31
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	150.000	8.569.400	(98,25)
Jumlah Belanja Kotor	522.958.625	396.753.849	31,81
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	522.958.625	396.753.849	31,81

Belanja Modal **B.5 Belanja Modal**

Rp237.250.000,-

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 237.250.000 dan Rp. 24.600.960. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar 864% dibandingkan per 30 Juni 2020 hal ini disebabkan karena pada semester ini hampir 90% belanja Modal sudah terealisasikan semua pada Semester I ini, hal ini lah yang menyebabkan meningkatnya realisasi belanja modal pada semester ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020

URAIAN	REALISASI PER 30 JUNI 2021	REALISASI PER 30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237.250.000	24.600.960	864
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	237.250.000	24.600.960	864
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	237.250.000	24.600.960	864

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 237.250.000,-

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 masing- masing adalah sebesar Rp. 237.250.000 dan Rp. 24.600.960, belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar 864% bila dibandingkan dengan realisasi semester I tahun lalu. Hal ini disebabkan karena hampir 90% belanja modal sudah direalisasikan pada semester I tahun ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019

URAIAN	REALISASI PER 30 JUNI 2021	REALISASI PER 30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Alat Pengolah data	0	24.600.960	#DIV/0!
PC Kepaniteraan	37.500.000	0	#DIV/0!
Mesin Antrian Sidang	0	0	#DIV/0!
Ruang Sidang Online	199.750.000	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	237.250.000	24.600.960	864,39

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.
60.000.000,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 60.000.000 dan Rp. 0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan per 30
Juni 2020*

Keterangan	per 30 Juni 2021	per 31 Desember 2020
Uang Tunai	43,349,800	-
Rek Bendahara 0098 01 000947 304	16,650,273	-
Pembulatan karena tidak ada pecahan uang kecil	(73)	-
Jumlah	60,000,000	-

*Kas
dibendahara
Penerimaan Rp.
0,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2021 dan per 31
Desember 2020*

Keterangan	per 30 Juni 2021	per 31 Desember 2020
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp. 0,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2021 dan 31
Desember 2020*

Keterangan	per 30 Juni 2021	per 31 Desember 2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang PNBPNP
Rp. 0,-*

4 Piutang PNBPNP

Saldo Piutang PNBPNP per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Piutang PNBPNP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBPNP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBPNP per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020

Uraian	per 30 Juni 2021	per 31 Desember 2020
Piutang PNBPNP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp. 0,-*

5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
TPA
Rp. 0,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp. 0,-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor.

*Belanja Dibayar
di Muka Rp. 0,-*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Tidak ada Belanja Dibayar dimuka pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk selama

Semester 1 Tahun Anggaran 2021 ini.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp. 0,-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan Rp. 3.202.746,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.202.746 dan Rp. 8.583.592.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	per 30 Juni 2021	per 31 Desember 2020
Barang Konsumsi	3.094.046	8.583.592
Barang untuk Pemeliharaan	108.700	-
Jumlah	3.202.746	8.583.592

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR Rp. 0,-

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan

adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp. 0,-*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp. 0,-*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah
Rp.
8.525.936.000*

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 8.525.936.000 dan Rp. 8.525.936.000. selama tahun 2019 nilai tanah tidak mengalami kenaikan/ penurunan. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	8.525.936.000
Mutasi tambah:	
Revaluasi Aset	-
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Saldo per 30 Juni 2021	8.525.936.000

Adapun Rincian Nilai Tanah sebagai berikut :

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1.150 m2	Rumah Dinas PTUN Bandar Lampung	1.943.214.000
2	3.000 m2	Gedung Kantor PTUN Bandar Lampung	6.582.722.000
Jumlah			8.525.936.000

Peralatan dan

Mesin

Rp.

3.162.702.231,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah Rp. 3.162.702.231 dan Rp. 2.925.452.231 . Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	2.925.452.231
Mutasi tambah:	
Pembelian	237.250.000
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi dari Aset tetap ke aset lainnya	-
Saldo per 30 Juni 2021	3.162.702.231
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021	-2.542.132.329
Nilai Buku per 30 Juni 2021	620.569.902

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa Pembelian PC Kepaniteraan senilai Rp. 37.500.000 dan Pengadaan Ruang sidang Online sebesar Rp. 199.750.000. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp.
7.843.212.000,-*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah Rp. 7.843.212.000 dan Rp. 7.252.679.000. selama semester I Tahun 2021 nilai Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan adanya Hibah berupa Pengaspalan Jalan untuk Gedung Kantor dan Rumah Dinas sebesar Rp. 590.533.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	7.252.679.000
Mutasi tambah:	
Hibah	590.533.000
Mutasi kurang:	-
-	-
Saldo per 30 Juni 2021	7.843.212.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021	(931.371.059)
Nilai Buku per 30 Juni 2021	6.911.840.941

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp.
15.221.000,-*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.221.000 dan Rp. 15.221.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	15.221.000
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	-
-	-
Saldo per 30 Juni 2021	15.221.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021	(12.176.800)
Nilai Buku per 30 Juni 2021	3.044.200

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp. 5.628.678,-*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp. 5.628.678 dan Rp. 5.628.678. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk semester I tahun 2021, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	5.628.678
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 Juni 2021	5.628.678
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	-2.800.000
Nilai Buku per 30 Juni 2021	2.828.678

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
(KDP) Rp. 0,-*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak ada KDP pada kantor PTUN Bandar Lampung untuk Semester I tahun 2021.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap (Rp.
3.488.480.188),-*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing (Rp. 3.488.480.188) dan (Rp. 3.204.228.657). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam

Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 30 Juni 2021

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	8.525.936.000	-	8.525.936.000
Peralatan dan Mesin	3.162.702.231	2.542.132.329	620.569.902
Gedung dan Bangunan	7.843.212.000	931.371.059	6.911.840.941
Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.221.000	12.176.800	3.044.200
Aset Tetap Lainnya	5.628.678	2.800.000	2.828.678
Akumulasi Penyusutan	11.026.763.909	3.488.480.188	16.064.219.721

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud Rp.
68.090.000*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah Rp. 68.090.000 dan Rp. 68.090.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	68.090.000
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
-	-
Saldo per 30 Juni 2021	68.090.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2021	(68.090.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2021	-

Aset Lain-Lain
Rp. 0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi kurang:	-
-	-
Saldo per 30 Juni 2021	-
Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2021	-
Nilai Buku per 30 Juni 2021	-

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya (Rp.
68.090.000),-

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp. 68.090.000 dan Rp. 68.090.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	68.090.000	68.090.000	0
Jumlah	68.090.000	68.090.000	0
Aset tetap yg tidak digunakan dalam operasi pemerintah	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Jumlah keseluruhan	68.090.000	68.090.000	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

<i>Uang Muka dari KPPN Rp. 60.000.000,-</i>	C.24 Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 60.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.
<i>Utang kepada Pihak Ketiga Rp. 0,-</i>	C.25 Utang kepada Pihak Ketiga Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 14.812.392. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.
<i>Pendapatan Diterima di Muka Rp. 0,-</i>	C.26 Pendapatan Diterima di Muka Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 1.039.500. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya namun barang/jasa belum diserahkan. Pendapatan diterima dimuka pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berasal dari Sewa Kantin.
<i>Beban yang Masih Harus Dibayar Rp. 0,-</i>	C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0 dan Rp.0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Ekuitas

Rp.

16.067.422.467,-

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 16.067.422.467 dan Rp. 15.513.419.952. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP Rp.
6.375.606,-*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 6.375.606 dan Rp. 6.702.813. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020

URAIAN	per 30 Juni 2021	per 30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.375.606	6.702.813	(4,88)
Jumlah	6.375.606	6.702.813	(4,88)

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan bangunan berasal dari Sewa Rumah Dinas dan Sewa Kantin.

*Beban Pegawai
Rp.
2.952.863.789,-*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.952.863.789 dan Rp. 2.690.373.083. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020

URAIAN	per 30 Juni 2021	per 30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.005.509.520	879.242.780	14,36
Beban Pembulatan Gaji PNS	13.980	13.413	4,23
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	65.330.398	51.251.934	27,47
Beban Tunjangan Anak PNS	21.685.813	19.336.014	12,15
Beban Tunjangan Struktural PNS	23.040.000	20.160.000	14,29
Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.460.020.000	1.383.635.000	5,52
Beban Tunjangan PPh PNS	198.379.838	161.650.582	22,72
Beban Tunjangan Beras PNS	52.287.240	40.410.360	29,39
Beban Uang Makan PNS	116.497.000	125.663.000	-7,29
Beban Tunjangan Umum PNS	10.100.000	9.010.000	12,10
Beban Lembur	-	0	#DIV/0!
Jumlah	2.952.863.789	2.690.373.083	9,76

*Beban
Persediaan Rp.
30.435.132,-*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 30.435.132 dan Rp. 20.758.130. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020

URAIAN	per 30 Juni 2021	per 30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	30.435.132	20.758.130	46,62
Jumlah	30.435.132	20.758.130	46,62

Beban Barang dan Jasa Rp. 325.216.908,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing- masing sebesar Rp325.216.908 dan Rp. 264.923.565. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya kenaikan pada Beban Keperluan Perkantoran serta pada Beban Barang Operasional Lainnya. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020

URAIAN JENIS BEBAN	per 30 Juni 2020	per 30 Juni 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	179.762.760	143.534.175	25,24
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.187.000	4.826.500	28,19
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	19.301.000	18.032.000	7,04
Beban Barang Operasional Lainnya	33.967.815	20.096.000	69,03
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	1.870.309	5.319.860	(64,84)
Beban Bahan	6.823.800	3.355.000	103,39
Beban barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19	225.000	0	#DIV/0!
Beban Langganan Listrik	42.779.099	34.697.764	23,29
Beban Langganan Telepon	752.538	791.566	(4,93)
Beban Langganan air	997.587	1.736.200	(42,54)
Beban Sewa	32.400.000	32.400.000	0,00
Beban Jasa Lainnya	150.000	150.000	0,00
Jumlah	325.216.908	264.939.065	22,75

Beban Pemeliharaan Rp. 162.661.247,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 162.661.247 dan Rp. 89.986.100. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. kenaikan

Beban Pemeliharaan terjadi karena pelaksanaan realisasi belanja pemeliharaan sudah mulai dikerjakan pada Semester 1 tahun ini. Rincian beban pemeliharaan per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020

URAIAN JENIS BEBAN	per 30 Juni 2021	per 30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59.759.264	4.994.000	1096,62
Beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	25.045.200	21.947.700	14,11
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	74.043.933	61.904.700	19,61
Beban Pers. Bahan Untuk Pemeliharaan	3.812.850	1.139.700	234,55
Jumlah	162.661.247	89.986.100	80,76

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp. 0,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing- masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 8.569.400. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Adapun penurunan pada Beban Perjalanan Dinas disebabkan karena pada semester ini masih terjadi Pandemi Covid 19 sehingga semua perjalanan Dinas Luar Kota ditiadakan untuk sementara waktu. Adapun Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020

URAIAN JENIS BEBAN	per 30 Juni 2021	per 30 Juni 2020	NAIK (TURUN)
Beban Perjalanan Biasa	0	7.369.400	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000	1.200.000	-87,50
Jumlah	150.000	8.569.400	-98,25

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp. 0,-*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat semester I TA 2021 dan semester I TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan
Sosial Rp. 0,-*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp.
284.251.531,-*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 284.251.531 dan Rp. 234.419.039. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Semester I TA 2021 dan Semester I TA
2020*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Semester I TA 2021	Semester I TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	156.076.151	117.937.260	32,34
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	126.653.280	114.959.679	10,17
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.522.100	1.522.100	-
Beban Penyusutan Jaringan	-	-	-
Jumlah Penyusutan	284.251.531	234.419.039	21,26
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Peny. Aset Tetap yang tdk digunakan dalam operasi	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	284.251.531	234.419.039	21,26

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp. 0,-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

*Surplus/Defisit
dari Kegiatan
Non
Operasional Rp.
491.249,-*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Adapun Surplus dari Kegiatan Non Operasional ini berasal dari Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pengembalian uang Makan Pegawai Bulan Desember 2020. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020

URAIAN	Semester I TA 2021	Semester I TA 2020	NAIK (TURUN) %
Surplus/ Defisit Dari Pelepasan Aset Non Lancar	0	5.199.999	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	5.199.999	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	-
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya	491.249	378.279	29,86
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	491.249	1.564.129	(68,59)
Beban Dari kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1.185.850	(100,00)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	491.249	5.578.278	(91,19)

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

*Pos Luar Biasa
Rp. 0,-*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa untuk Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020 masing-masing adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.

15.513.419.952.

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing- masing sebesar Rp. 15.513.419.952 dan Rp. 15.788.285.258.

Surplus/Defisit

LO

(Rp.

3.748.711.752).

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar (Rp. 3.748.711.752) dan (Rp. 3.296.748.226). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang/lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp. 0.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp.

0.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

<p><i>Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp. 0,-</i></p>	<p>E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap</p> <p>Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.</p>
<p><i>Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp. 0,-</i></p>	<p>E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi</p> <p>Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.</p>
<p><i>Koreksi Lain-Lain Rp. 0,-</i></p>	<p>E.3.5 Koreksi Lain-Lain</p> <p>Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi dari Jurnal Akrual yang terdapat perbedaan nilai Rupiah dari hasil yang dicantumkan di Jurnal Akrual dengan Kuitansi Rekening Tagihan utang pada Pihak ke 3.</p>
<p><i>Transaksi Antar Entitas Rp. 4.302.714.267,-</i></p>	<p>E.4 Transaksi Antar Entitas</p> <p>Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.302.714.267 dan Rp. 3.101.458.580. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.</p>

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.718.008.622
Diterima Dari Entitas Lain	(5.827.355)
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	590.533.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	4.302.714.267

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2021, DDEL sebesar (Rp. 5.827.355) sedangkan DKEL sebesar Rp. 3.718.008.622.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 0. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung

entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp. 0.

Ekuitas Akhir

Rp.

16.067.422.467,

-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 16.067.422.467 dan Rp. 15.592.995.612.

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian yang penting apapun setelah tanggal neraca di satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk periode per 30 Juni 2021 yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN :

F.2.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

-

F.2.2 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung adalah:

- 1.** BRI CABANG TANJUNG KARANG A/C 0098.01.000.947.30.4 A.N. Bpg 017 PTUN BANDAR LAMPUNG 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA MARI dengan saldo per 30 Juni 2020 sebesar Rp. 16.650.273.
- 2.** BRI CABANG TANJUNG KARANG A/C 0098.01.001620.30.3 a.n. Bpg 017 PTUN BANDAR LAMPUNG 05 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 600.000.

F.2.3 Revisi DIPA

Pada Periode yang berakhir 30 Juni 2021 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung melakukan belum melakukan Revisi DIPA selama semester I TA 2021.

2.4 Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Untuk Informasi Mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP dan SSPB Pada Periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung tidak terdapat Ralat-ralat tersebut diatas.

F.2.5 Catatan Penting Lainnya

- Tidak Terdapat Catatan Penting Lainnya yang perlu di ungkap di Laporan Keuangan pada periode semester I Tahun Anggaran 2021.

Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2021

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2020	Tahun 2020	Per 30-06-2021	Per 30-06-2021
A	Tanah						
1	Tanah	-	8.525.936.000	-	-	8.525.936.000	8.525.936.000
	Jumlah		8.525.936.000	-	-	-	8.525.936.000
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	699.889.641	699.889.641	-	699.889.641	-
2	Alat Kantor	5	194.689.039	174.459.539	6.866.500	181.326.039	13.363.000
3	Alat Rumah Tangga	5	1.190.340.261	811.007.761	81.721.500	892.729.261	297.611.000
4	Alat Studio	5	53.102.000	31.890.600	2.430.200	34.320.800	18.781.200
5	Alat Khusus Kepolisian	4	57.500.000	-	7.187.500	7.187.500	50.312.500
5	Alat Komunikasi	5	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
6	Komputer Unit	4	687.706.000	449.685.590	44.606.502	494.292.092	193.413.908
7	Peralatan Komputer	4	278.075.290	217.723.047	13.263.949	230.986.996	47.088.294
	Jumlah		3.162.702.231	2.386.056.178	156.076.151	2.542.132.329	620.569.902
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Ke	50	6.998.215.000	704.077.347	110.815.909	814.893.256	6.183.321.744
2	Bangunan Gedung Tempat Tin	50	528.097.000	59.560.801	9.968.853	69.529.654	458.567.346
3	Tugu Tanda Batas	50	316.900.000	41.079.631	5.868.518	46.948.149	269.951.851
	Jumlah		7.843.212.000	804.717.779	126.653.280	931.371.059	6.911.840.941
D	Jalan dan Jembatan						
1	Jalan	10	15.221.000	10.654.700	1.522.100	12.176.800	3.044.200
	Jumlah		15.221.000	10.654.700	1.522.100	12.176.800	3.044.200
E	Konstruksi Dalam Pengerjaan						
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	0	-	-	-	-
	Jumlah		0				-
F	Aset Tetap Lainnya						
1	Barang bercorak kesenian	4	5.628.678	2.800.000	-	2.800.000	2.828.678
	Jumlah		5.628.678	2.800.000	-	2.800.000	2.828.678
	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan						
1	Alat Bantu	7	99.500.000	99.500.000	-	99.500.000	-
2	Alat Angkutan Darat Bermot	7	10.000.000	-	-	10.000.000	-
	Jumlah		109.500.000	99.500.000	-	109.500.000	-
	Total		22.840.123.140	5.700.439.535	441.849.782	6.152.289.317	16.064.219.721

